

ABSTRAK

Pelaksanaan *e-procurement* termasuk kedalam salah satu program nasional untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana nantinya melalui program tersebut seluruh instansi, institusi baik pada sektor pertambangan maupun lainnya harus menerapkan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa. *E-procurement* menawarkan kesempatan seluas-luasnya untuk perbaikan dalam biaya dan produktivitas. Oleh karenanya *e-procurement* merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyempurnakan manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pencarian sumber pembelian. Walhasil, *e-procurement* akan meningkatkan kunci keberhasilan dalam meningkatkan daya saing dimasa datang dan yang paling penting dengan berjalannya proses *e-procurement* dengan baik maka prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* juga akan terwujud dengan baik. Untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya sebagian atau keseluruhannya dibebankan pada APBN/APBD harus tunduk pada Keppres No. 80 Tahun 2003. Pengadaan barang/jasa BUMN yang pembiayaannya tidak dibebankan pada APBN dapat menggunakan ketentuan Direksi masing-masing BUMN, berupa ketentuan internal (*Standard Operating Procedures/SOP*), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2008. Hasil penelitian adalah bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kantor Proyek Indarung VI PT Semen Padang belum dilaksanakan dengan baik, dan Undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa belum memberikan sanksi yang cukup tegas. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-proc*) juga belum terlaksana (belum tercapai) dengan baik



ABSTRACT

The implementation of *e-procurement* is one of the national program to achieve procurement of goods and services that is free of Corruption, Collusion, and Nepotism. By the implementation of the program, it is expected that all institutions even in the sector of mining should implement e-procurement in the procurement process. E-procurement offers the widest opportunity to the betterment, in terms of cost and productivity. Hence, e-procurement is one of the most effective ways to improve management, both directly and indirectly, in the search for the sources of purchases. Consequently, e-procurement shall improve the competition in the future and most importantly, the implementation of good e-procurement process shall lead to the achievement of Good Corporate Governance principles. The procurement of goods and services conducted by State-owned Enterprises whose funding – partially or entirely – is covered by Local Budget/State Budget must comply with the Presidential Decree No. 80 of 2003. That of the State-owned Enterprises that are not covered by State Budget may apply the directives of the respective State-owned Enterprises' Board of Directors which may come in the form of internal provisions (Standard Operating Procedures, SOP), in line with the State-owned Enterprise Ministerial Decree No. 5 of 2008. The result of the Research is that the electronic procurement of goods and services in the Semen Padang's Indarung VI Project Office is yet properly conducted, and the Law that regulates procurement of goods and services has not provided rigid sanctions. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the e-procurement (e-proc) has yet been implemented (achieved) properly.

